Prof Dr H. Abd A'la, M.Ag,

Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya

Saat ini penyalahgunaan kekuasaan merupakan fenomena kuat yang dapat ditemui di mana-mana. Sebagai misal, mereka yang "dipercayai" memimpin partai politik menjadikan partai mereka sebagai ajang untuk mengumbar ambisi politik dan meneguhkan kepentingan yang sesaat. Sejumlah figur yang terpilih untuk memimpin daerah menganggap kekuasaan sebagai milik mereka yang lalu dipergunakan untuk melabuhkan harapan dan keinginan mereka yang sangat sempit yang merujuk kepada subyektivitas diri sendiri dan kelompok. Demikian pula, mereka yang memiliki jabatan di berbagai institusi tampak terjebak ke dalam tarikan-tarikan yang menggiurkan untuk memanfaatkan jabatan yang diembannya.

Ujung-ujungnya adalah terjadinya korupsi dan praktik-praktik kotor lain yang sejenis. Nyaris tidak ada lembaga yang bersih dari praktik jahat yang merugikan rakyat dan negara. Bahkan lembaga yang mengurus persoalan yang berkaitan dengan keagamaan pun tak luput menjadi sarang tikus-tikus ganas pemakan uang rakyat.

Ironisnya, masyarakat tampak membiarkan terjadinya praktik-praktik kotor itu. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang ikut memperparah dengan masuk ke dalam pusaran degradasi moral ini melalui praktik-praktik kotor yang lain, "memperpendek jalan" setiap kali berurusan dengan birokrasi. Alasan mereka sangat sederhana, tinimbang harus melalui jalan berliku-liku, mereka memilih untuk memotong jalur. Sebab tanpa melakukan hal itu, urusan menjadi berbelit-belit dan akan dipersulit setengah mati

Semua itu memperlihatkan memudarnya moralitas luhur dari kehidupan bangsa. Nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan sejenisnya mulai menghilang berganti dengan menguatnya ambisi, dan kerakusan, dan pola hidup pragmatis.

Hipokrisi dan Ketertutupan

Berdasarkan hal itu dapat dikatakan,fenomena kehidupan, terutama di ruang publik, yang tampak menguat saat ini ternyata penuh dengan ambivalensi; bertentangan dengan realitas senyatanya. Masyarakat, terutama para elitnya, telah menjungkir-balikkan kenyataan sedemikian rupa sehingga sulit untuk dilihat sebagaimana apa adanya. Yang muncul ke permukaaan hanya serpihan, potongan-potongan bersifat parsial yang tidak dapat merepsentasikan hakikat yang substantif. Kejahatan terlihat sebagai kebaikan; dan begitu pula sebaliknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kondisi yang demikian, nyaris menjadi pemandangan yang sangat biasa bila kita menyaksikan seseorang yang sehari-hari tampak sebagai tokoh pejuang moral dan di mana-mana selalu berkhotbah tentang pentingnya moral, tiba-tiba melakukan praktik-praktik yang bertentangan dengan sikap dan perilakunya yang selama ini ditampakkan. Demikian pula, seorang figur ternama yang kelihatan saleh karena rajin menjalankan ritual agama di hadapan publik tiba-tiba menyalahgunakan kekuasaan dengan melakukan semisal mega-korupsi yang nyaris membangkrutkan negara.

Menyikapi terjadinya penyimpangan itu, masyarakat lebih menampakkan perlawanan yang setengah hati. Sebagian masyarakat terkesan kuat belum menjadi dewasa yang peka terhadap bahaya ambruknya moral. Karena itu, gerakan penentangan terhadap hal itu sering hanya dalam sekejap, sporadis, dan lebih bersifat demonstratif artifisial yang tidak mengakar serta tidak didasarkan pada komitmen moral yang dapat dipertanggung-jawabkann. Hal itu dapat dimaklumi karena sebagian mereka justru mengambil manfaat sempit dan pragmatis, baik dari penyimpangan yang terjadi, maupun dari aksi yang mereka lakukan.

Sampai derajat tertentu, hal itu menunjukkan bahwa hipokrisi telah menjangkiti sikap dan perilaku sebagian masyarakat dan elit-elit yang berkuasa. Terkait dengan itu, dalam menyelesaikan kasus-kasus penyalahgunaan kekuasaan, ketertutupan nyaris menjadi nuansa kental yang mewarnai tindakan mereka dalam menangani persoalan tersebut. Bahkan dalam tataran yang lebih ekstrem, lembaga-lembaga publik kita masih menjalankan sistem yang mengarah kepada ketertutupan dalam mengelola dan melaksanakan segala urusan yang bersifat publik. Keterbukaan yang dikembangkan lebih bersifat formal yang direkayasa sedemikian rupa sehingga pertanggung-jawabannya sekadar bersifat administratif murni. Pertanggung jawaban tidak didasarkan pada moralitas dan substansi maknanya sebagai bentuk pemeliharaan dan pengembangan amanah dari rakyat dan masyarakat. Dengan demikian, aksi yang tampak bisa berbeda jauh dengan tujuan yang sebenarnya, sehingga kasus-kasus yang ada jarang dapat diselesaikan dalam arti yang sebenarnya. Pada sisi ini, kesenjangan antara fenomena dan realitas menjadi suatu yang tidak bisa dihindari, yang pada gilirannya bukan hanya akan merugikan pelaku yang bersangkutan, tapi negara dan rakyat secara keseluruhan.

Pengembangan Demokrasi

Sejatinya, perlawanan terhadap penyalahgunaan kekuasaan mesti disertai dengan pengembangan sistem yang menekankan keterbukaan pada semua lembaga publik yang ada, baik pemerintah maupun lainnya, termasuk lembaga sosial seperti LSM, serta masyarakat. Dengan demikian, semua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang dapat mengakses dan mengetahui kinerja masing-masing secara pasti dan akurat, serta satu dengan lain bisa saling melakukan semacam pengawasan.

Seiring dengan itu, hukum yang ada harus seutuhnya berpijak pada nilai-nilai keadilan sehingga dapat menjangkau semua orang, dan semua lembaga, serta dapat memperlakukan semuanya secara setara. Dalam konteks ini, lembaga penegakan hukum dituntut mengembangkan suatu sistem yang benar-benar dapat menyentuh rasa keadilan, di mana di dalamnya tidak ada ruang yang memberi kesempatan bagi siapa pun untuk membiaskan ke arah yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan substantif yang intinya adalah hak seluruh rakyat untuk memperolehnya. Pada saat yang sama, siapa pun yang melanggar hukum, ia perlu mendapatkan ganjaran sesuai dengan nilai keadilan, tanpa mengorbankan pihak lain yang tidak bersalah.

Pada sisi itu sebenarnya urgensi negara untuk mengembangkan demokrasi substantif yang tidak sekadar terpaku pada prosedur dan simbol formal. Oleh karena inti demokrasi adalah rakyat dan keadilan, serta kesetaraan, maka ranah publik seutuhnya milik mereka yang harus disikapi dan dikelola secara terbuka dan secara adil secara bersama-sama. Transparansi menjadi salah satu inti dari demokrasi karena tanpa itu ruang publik yang sejatinya milik dan menjadi tanggung-jawab rakyat hanya akan bersifat semu. Pada gilirannya keterbukaan menuntut adanya kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan etika-moral sejenis dari semua pihak, termasuk dari masyarakat sendiri. Tanpa semua itu, masyarakat akan menjadi obyek dari kepentingan orang dan kelompok tertentu, serta pada saat yang sama masyarakat tidak akan pernah menjadi dewasa. Kejahatan yang merugikan negara dan rakyat dimungkinkan akan terus berlangsung.

Pada saat yang sama, keterbukaan akan mengantarkan seorang yang selama ini dikenal akan integritas kepribadiannya berupaya dengan konsisten untuk menjaga etika-moral yang disandangnya. Sebab ketika ada peluang untuk menyimpang, masyarakat akan mengetahui dan melakukan kontrol sedini mungkin. Pembumian nilai-nilai demokrasi substantif akan menjadikan moral sebagai sistem yang tidak hanya bersifat personal, tapi juga institusional. Itulah agenda yang perlu dikembangkan secara sungguh-sungguh ke depan dan perlu dilabuhkan ke dalam realitas nyata kehidupan bangsa

Untuk itu dalam Pemilihan Umum Legislatif yang akan digelar ini, kita harus memilih caleg yang benar-benar memiliki integritas kepribadian, cerdas, dan memiliki program yang jelas. Semoga Indonesia lebih baik©

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id